

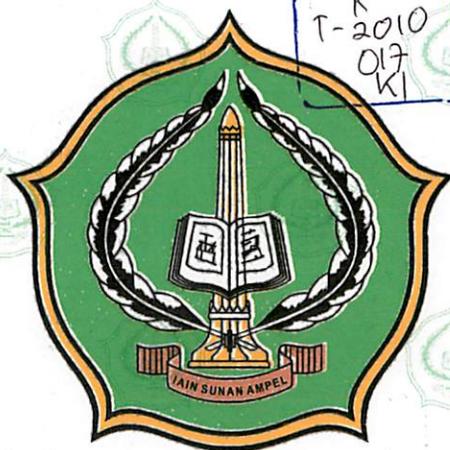
**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PESANTREN AN-NUR PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
ROUDLOTUL MUTA'ALLIMIN SURABAYA**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
LUKMAN HAKIM
NIM : D03205070**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K T-2010 017 KI	No REG : 2010/KI/017 ASAL BUKU : TANGGAL :



**FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pendidik maupun orang tua murid serta khalayak ramai tidak henti-hentinya merasa kurang puas dengan sistem pendidikan yang ada. Kecaman terhadap pendidikan akan selalu terdengar sepanjang masa. Ketidakpuasan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Kemajuan ilmu pengetahuan yang menimbulkan peledakan pengetahuan menyebabkan guru sebagai sumber pengetahuan tidak lagi memadai. Ledakan penduduk, membanjirnya anak ke sekolah meningkatnya biaya pendidikan menimbulkan rasa kurang puas dengan sistem pendidikan yang berlaku.

Pendidikan yang dipandang kurang relevan dengan pembangunan, mutu pendidikan yang dianggap kian merosot menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Ketidakpuasan itu merupakan dorongan untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu.¹

Keberhasilan Pembangunan Nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar, telah memiliki modal sumber daya manusia yang secara kuantitatif cukup besar. Oleh karena itu kiranya perlu diusahakan agar penduduk yang sedemikian besar dapat

¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyah *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hal: 98.

yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Indonesia telah dimulai pada tahun 1994 dengan target tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, karena krisis perekonomian nasional pada tahun 1997, program ini berlangsung kurang optimal. Oleh karena itu, penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dijadwal ulang dan ditargetkan tuntas pada tahun 2008. Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sudah ditetapkan sebagai gerakan nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Dalam Inpres tersebut ditegaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Satuan Pendidikan yang sederajat sekurang-kurangnya mencapai 95% pada akhir tahun 2008.²

Untuk mencapai target Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada akhir 2008 itu masih banyak kendala yang dihadapi, antara lain:

1. APK rata-rata nasional tahun 2006 sudah mencapai angka 88,68%, tetapi masih sekitar 1,47 juta anak usia 13-15 tahun yang saat ini belum mendapat layanan pendidikan SMP/MTs/Satuan Pendidikan

²Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional & Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, *Panduan Pelaksanaan Workshop Peningkatan Peran Pondok Pesantren Dalam Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*, Jakarta, thn 2007 hal: 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional pasal 14 Ayat 2 juga menegaskan bahwa warga Negara yang berumur 7-15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Pemerataannya memang menjadi sasaran utama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Karena mereka berada di berbagai kelompok masyarakat, baik di pertengahan kota, maupun di daerah yang terpencil, maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin kompleks.⁴ Lahirnya WAJARDIKDAS yang memang sarannya adalah Pondok Pesantren Salafiyah juga didasarkan oleh Inpres Nomor 1 tahun 1994 telah dicanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Karena mengingat bahwa Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan Pondok Pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) sehingga telah banyak melahirkan para kader ulama', guru agama, mubaligh yang keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan peran Pondok Pesantren Salafiyah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi para santri yang ingin menuntut ilmu umum ke jenjang yang lebih tinggi, telah

⁴Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2006-2009, edisi I, Jakarta 2007 hal: 6-7

dilakukan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000.⁵

Berdasarkan data perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada bulan Juli 2001, jumlah PKBM di propinsi Jawa Timur adalah 178 PKBM. Dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 103 merupakan PKBM yang dibiayai oleh pemerintah, sedangkan yang lain merupakan swadaya masyarakat, yang salah satunya adalah Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur.

Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Salafiyah "Raudlatul Muta'allimin" Jatipurwo-Surabaya, yang dikenal dengan kesalafannya. Lahirnya lembaga ini diawali dengan berdirinya TPQ An-Nur pada tahun 2003. Selangkah demi selangkah pendidikan di An-Nur banyak dilirik oleh masyarakat setempat. Seiring dengan kebutuhan masyarakat sekitar, pembelajaran yang ada di lembaga ini pun diperbarui, dari yang semula hanya sorogan Al-Qur'an, kemudian ditambah dengan pembelajaran kitab-kitab kuning. Kemajuan tersebut membawa sang pendiri lembaga, yaitu **Gus** (sapaan untuk anak Kyai) **Achmad Shofawi Al-Ishaqi** untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan.

⁵ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta, 2006, hal: 2.

Sebagai tindak lanjut dari lembaga yang letaknya tidak jauh dari induknya ini, yaitu di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kab/Kota Surabaya, tepatnya di Jl. Wonosari Wetan Baru No. 35 ini, maka pada tahun 2006 lahirlah Madrasah Diniyah An-Nur. Atas tuntutan masyarakat dan para wali santri serta didukung dengan keinginan Pondok Pesantren Induk "Raudlatul Muta'allimin" yang menginginkan agar peserta didik yang tamatan dari Madrasah Diniyah An-Nur ini memperoleh ijazah formal, sebagaimana perolehan ijazah dari sekolah-sekolah umum (formal) lainnya, dengan harapan agar para lulusan dapat melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Mulai dari para guru, perangkat RT/RW setempat, sampai kalangan anak jalananpun menyampaikan keinginan mereka untuk dapat memiliki ijazah yang "*di akui*" secara langsung kepada Ust. Fathur Rahman selaku pengelola lembaga An-Nur. Di samping ridlo dari Gus Achmad Shofawi Al-Ishaqi selaku pendiri Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur, keinginan dari masyarakatlah yang juga ikut memotivasi pengelola untuk terus mencari informasi, peluang-peluang, serta apapun itu yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tanpa memberatkan para wali santri dalam hal pembiayaan. Karena realitasnya, para santri An-Nur dan Pondok Pesantren "Raudlatul Muta'allimin" 95% bebas biaya. Karena keduanya menggunakan prinsip "*Ta'awun 'Alal Birri*" sampai akhirnya pada tahun 2007 lembaga pendidikan dan pesantren An-Nur ini mengadopsi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Karena Para Ahli Pendidikan Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan

pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka.⁶

Di samping itu pada saat yang bersamaan pemerintah memang sudah mencanangkan suatu program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang sarasannya adalah pondok pesantren salafiyah, yang sebagian besar dari inputnya ialah mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur yang memiliki input seperti yang tersebut di atas, bisa merealisasikan rencananya untuk mengadopsi program Wajardikdas yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga ini memiliki induk lembaga yakni Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin.

“Hidup dalam era modern sekarang ini, seseorang harus berlari untuk terus berada di tempatnya”. Ungkapan inilah yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya kita melakukan perubahan yang seiring dengan perkembangan zaman. Karena kita semua sudah tahu bahwa dimensi waktu tidak dapat berhenti atau dihentikan begitu saja.

Dalam melakukan perubahan, tidak hanya mengganti prosedur yang lama menjadi prosedur yang lebih baru, melainkan yang terpenting adalah melakukan perubahan secara tepat. Prof. DR. Sondang P. Siagian, MPA dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Abad-21” menyebutkan bahwa

⁶ M. Athiyah al-Abrasyi *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, alih bahasa oleh Bustami, A. Ghani, dan Djohar Bahry (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal., 1

dalam melakukan perubahan-perubahan, ada empat teknik yang harus kita diperhatikan, yaitu:

1. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin berakibat pada penolakan terhadap perubahan,
2. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi kecenderungan penolakan perubahan,
3. Nilai-nilai yang dianut dalam mewujudkan perubahan, dan
4. Peranan para agen pengubah dalam mewujudkan perubahan.⁷

Itulah teknik-teknik dalam manajemen perubahan yang harus diperhatikan apabila kita menginginkan perubahan yang tepat. Hal itu juga yang dijadikan dasaran oleh Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya dalam melakukan perubahan pada lembaganya. Selain itu, sehubungan dengan letaknya yang masyarakatnya sangat agamis, beriman, dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam mentaati Firman-Firman Allah, peran ulama' memang sangat sesuai untuk memudahkan dalam melakukan pendekatan. Ditambah lagi dengan adanya moto bahwa belajar adalah ibadah.⁸

Sesuai dengan konsep dasarnya, lembaga ini menggunakan WAJARDIKDAS langsung dalam dua tingkat, yaitu Tingkat Ula (setara dengan SD/MI) dan Tingkat Wustho (setara dengan SLTP/MTs.). Meski baru berjalan dua periode, akan tetapi keberadaan program WAJARDIKDAS di

⁷ Sondang P. Siagian "Manajemen Abad-21", hal:221

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Sosialisasi & Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Jakarta, 2007 hal: 4

2) Secara Praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui apakah implementasi atau penerapan Wajardikdas Sembilan Tahun Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur di Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya sudah sesuai dengan konsep yang dari awal memang jadi aturan dan digunakan sebagai dasaran oleh lembaga yang bersangkutan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memberikan pemahaman yang tepat terhadap judul *Implementasi Wajardikdas Sembilan Tahun Lembaga Pendidikan Dan Pesantren An-Nur di Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya*, maka disini penulis ingin menguraikan apa saja inti dari yang telah tertera di atas yakni :

1. **Implementasi** adalah suatu proses penerapan ide, kelayakan, dan inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai sikap.⁹ Dengan kata lain yang lebih singkat dapat diartikan bahwa implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan.
2. **Wajardikdas Sembilan Tahun** ialah Gerakan Nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, yakni bagi warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar atau

⁹E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik & Implementasi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003), hal: 93

letak yang cukup agamis, karena memang di sekitarnya banyak sekali Pondok Pesantren.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperlukan.¹³ Untuk mengetahui sumber data, karena harus diketahui dari mana data diperoleh, kalau data itu sudah diketahui, maka data-data tersebut mudah untuk didapatkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a) *Library research* atau sumber literature yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.
- b) *Field research* atau sumber data lapangan yaitu data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian yang diselidiki, sumber data ini ada dua jenis data yaitu:
 - 1- Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁴ Yakni implementasi Wajardikdas yang meliputi:
 - a. Prosedur penyelenggaraan
 - b. Kurikulum
 - c. Ketenagaan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 107

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal.83

- d. Sarana prasarana
- e. Metode pembelajaran
- f. Pembiayaan
- g. Struktur organisasi
- h. Supervisi
- i. Monitoring
- j. Pelaporan.

2- Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama .

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode yang meliputi:

a. Metode Observasi

Dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa metode observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung, maupun tidak langsung.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model observasi tak berstruktur dan partisipasi pasif. Peneliti lebih menonjolkan perannya sebagai peneliti atau pengamat pada obyek

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 136

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: BumiAksara, 2001), hal., 30

observasi. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran mengenai sarana prasarana serta penerapan kurikulum pembelajaran Wajardikdas Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur di Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya .

b. Metode Interview (wawancara)

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka atau mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Menurut Suharsimi Arikunto interview merupakan usaha untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara dialog langsung dengan diwawancarai¹⁸

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai beberapa hal yang meliputi: sejarah berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin, perkembangannya, latar belakang berdirinya Wajardikdas, pembiayaan, supervisi, monitoring, factor-faktor penghambat, serta factor-faktor pendukung Wajardikdas Sembilan Tahun Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur di Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya.

c. Dokumentasi

Metode ini tidak kalah penting dari metode-metode pengumpulan data yang lainnya. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau lainnya berupa catatan mengenai hal-hal atau variabel, transkrip, buku-buku,

¹⁷ Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 831

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Op. Cit., hal., 132

2. Metode Induktif

Pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹

3. Metode Deduktif

Metode yang dimulai dengan mengemukakan kaidah, teori dalil, serta pendapat-pendapat yang relevan yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.²²

Penggunaan metode kualitatif pada skripsi ini berdasarkan pertimbangan serta argumentasi sebagai berikut:

Peneliti ini berakar pada latar belakang alamiah, sebagai keutuhan, mengadakan analisa data yang induktif, mengarahkan penelitian pada usaha menemukan teori lebih bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi study dengan fokus, memilih seperangkat hasil kriteria untuk memeriksa keabsahan data dan rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak, peneliti dan subyek penelitian.

Dari adanya beberapa alasan tersebut penelitian sudah cukup mendukung dalam penggunaan metode kualitatif, tentunya dari penelitian ini tiada harapan lain kecuali dapat mempermudah peneliti dalam proses penggalan data. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah penerapan

²¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1993), 42

²² Hajir, *Metodologi Penelitian*, 197

untuk menempuh minimal pendidikan dasar 9 tahun, tanpa memandang status sosial, etnis, dan jenis kelamin.²³

Meskipun demikian yang jadi kendala pada program ini tidak lain adalah pemerataannya. Namun dari data yang diperoleh penulis menyatakan bahwa pemerataan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Hamid Muhammad 02/04/2007 mengatakan target pencapaian APM SD/MI/Sederajat dan APK SMP/MTs/Sederajat pada tahun pelajaran 2008/2009 sebesar 95%.²⁴ Sedangkan data pada tanggal 18/03/2008 pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sudah 92,52%.

Bahkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun ini (27/04) sudah mencapai angka partisipasi kasar (APK) sebesar 96,18%.²⁵ Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan bahwa pencapaian program wajar dikdas di Indonesia delapan tahun lebih cepat daripada target dunia.

1. Pengertian Wajardikdas Sembilan Tahun

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari pengertian WAJARDIKDAS Sembilan Tahun, maka akan lebih efektif jika penulis memaparkan satu-persatu artinya, yaitu:

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Sosialisasi & Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Jakarta, 2007 hal: 1

²⁴http://www.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=2

²⁵ *Harian Pikiran Rakyat, Senin 27 April 2009*

1. **Wajib Belajar** ialah merupakan suatu program yang di implementasikan dalam Gerakan Nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, yang artinya bahwa diwajibkan bagi seluruh warga Negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.²⁶
2. **Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun dengan perincian 6 tahun di Sekolah Dasar atau yang setara dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang setara.²⁷

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa **Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** adalah program pemerintah tentang pemerataan penuntasan pendidikan dasar yang ditujukan kepada seluruh warga Indonesia yang berusia 7-15 tahun untuk menyelesaikan pendidikan umum yang lamanya 9 tahun dan dibagi dalam dua jenjang, yakni pendidikan dasar yang lamanya 6 tahun dan diteruskan 3 tahun dalam pendidikan lanjutan pertama.

Mengingat bahwa Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, maka sasaran utamanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah di dunia pesantren. Pondok Pesantren berasal dari dua kata yaitu pondok dan pesantren. Secara

²⁶ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, , Jakarta, 2006, hal: 7.

²⁷ *ibid*

etimologi “pondok” berarti rumah untuk sementara waktu. Sedangkan pesantren adalah pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati ajaran-ajaran islam sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan pada pentingnya moral atau pembentukan SDM yang berakhlakul karimah.²⁸ Sedangkan menurut Drs. HE. Badri, M. Pd, dan Munawwiroh, S. Pd (ed) memberikan pengertian tentang pesantren bahwa suatu pendidikan khas Indonesia yang telah menyatu di tengah-tengah masyarakat dan memang sudah teruji kemandiriannya sejak awal berdirinya hingga sekarang.²⁹ Sedangkan Pondok Pesantren Salafiyah dapat diberikan pengertian sebagai suatu lembaga pendidikan yang masih mempertahankan sistem pesantren, baik dari segi kurikulumnya maupun metode pembelajarannya.

2. Landasan Hukum

Penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah mengacu kepada beberapa landasan “yuridis” yang secara bahasa berarti secara hukum atau menurut hukum.³⁰ Yang dimaksud dengan hukum disini adalah menggunakan Hukum Tata Negara, yang memiliki pengertian bahwa suatu hukum yang

²⁸ Jamaluddin Malik, Pemberdayaan Pesantren, Cetakan I, Yogyakarta 2005, hal: 1

²⁹ Badri dan Munawwiroh Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah, Cetakan I Jakarta 2007, Puslitbang Lektor Keagamaan, Depag hal: 3

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal: 1278

mengatur tentang penetapan struktur dan sistem organisasi yang memuat tentang permasalahan-permasalahan sebagai berikut³¹:

- I. Mengatur tentang bentuk Negara (Kesatuan atau Federal);
- II. Mengatur tentang bentuk Pemerintahan (Republik atau Kerajaan);
- III. Mengatur masyarakat atasan dan bawahan;
- IV. Mengatur alat-alat perlengkapan Negara yang memegang kekuasaan;
- V. Mengatur tentang kekuasaan;
- VI. Mengatur tentang siapa rakyat serta apa saja tugas dan tanggung jawabnya;
- VII. Mengatur alat-alat perlengkapan Negara beserta susunannya.

Dengan pengertian di atas, maka program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dalam penyelenggaraannya berdasarkan beberapa hukum berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

³¹ Suhardana Hukum Perdata I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996, Hal: 10-11

- kep/DS/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor: DJ.II./526/2003 dan Nomor: 6016/G/HK/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tentang Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Penyelenggara Program Wajar Dikdas Nomor: DJ.II/527/2003 tentang Penerbitan Ijazah pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajar Dikdas;³²
 14. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 16. UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

³² Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, , Jakarta, 2006, hal: 3-4

22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0306/U/1995 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Lingkungan Departemen Agama;
24. Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.³³

3. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Tentunya penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah memiliki tujuan-tujuan yang signifikan, yang sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan di masa mendatang, baik untuk dirinya sendiri (Pondok Pesantren), untuk bangsanya, maupun bagi peserta didik atau santri di Pondok Pesantren yang bersangkutan. Oleh karena itu yang menjadi tujuan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah antara lain:

1. Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terhadap peserta didik yang nantinya

³³ Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2006-2009, edisi I, Jakarta 2007 hal: 10-12

diharapkan mendapat pengetahuan yang setara serta kesempatan yang sama pula dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah santri,³⁴

2. Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui salah satu jalur alternatif, yakni Pondok Pesantren Salafiyah.³⁵

b. Sasaran

Melihat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pemerataan dan penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun yang serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia, dimana salah satu dari sasaran utamanya dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah masyarakat umum yang terdiri atas tokoh agama, pengusaha, budayawan, cendekiawan, seniman, tokoh media, dan lain-lain.³⁶ Oleh karena itu Pondok Pesantren juga termasuk di dalamnya. Kata “sosialisasi” berasal dari kata “sosial” yang berarti: mengenai masyarakat, sedangkan sosialisasi itu sendiri memiliki arti suatu upaya atau usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (Negara),³⁷ maka dasarnya yang menjadi sasaran dari

³⁴ Departemen Agama RI, PERANGKAT ADMINISTRASI Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula dan Wustha, Jakarta 2005, hal: 3.

³⁵ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta, 2006, hal: 8.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Sosialisasi & Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Jakarta, 2007 hal: 3

³⁷ Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hal: 150

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah:

1. Semua santri yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang masih berusia 7-15 tahun yang sedang tidak belajar di SD/MI dan SMP/MTs, bukan juga tamatannya atau tidak memiliki ijazah;
2. Program ini juga terbuka untuk santri yang memiliki usia lebih dari 15 tahun.³⁸

4. Jenjang Pendidikan

Kata “jenjang” berarti tahap atau tingkat yang teratur dari bawah ke atas. Sedangkan jenjang pendidikan ialah tahap-tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum.³⁹

Sebenarnya untuk jenjang pendidikan yang digunakan dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah sama dengan jenjang pendidikan yang ada di sekolah-sekolah formal pada umumnya, yakni Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), hanya saja istilah yang digunakan yang berbeda yaitu:

³⁸ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, , Jakarta, 2006, hal: 9

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal: 469

5. Sebagai program pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.⁴⁰

Selain itu, juga memaparkan 3 komponen yang harus ada pada suatu kurikulum, yaitu:

1. Komponen Tujuan, yang dimaksud disini adalah tujuan pendidikan yang dapat dinyatakan dalam berbagai rumusan, ada rumusan yang sifatnya resmi seperti GBHN dan kurikulum sekolah (GBPP), ada juga rumusan yang sifatnya tidak resmi seperti keinginan wali/orang tua siswa dan masyarakat;
2. Komponen Isi, pengertian isi disini adalah merupakan bahan pengajaran setiap mata pelajaran yang ada dalam kurikulum atau yang biasa kita sebut dengan materi pelajaran yang tentunya bahan tersebut harus sesuai dengan tujuan-tujuan pelajaran atau tujuan instruksional;
3. Komponen Organisasi dan Strategi, dimana di dalamnya tercantum struktur organisasi, baik secara horizontal maupun vertical. Sedangkan Organisasi Kurikulum memiliki pengertian yaitu sebagai tataran materi yang berupa bentuk bahan serta pelaksanaannya.⁴¹

⁴⁰ Lafni Ladjid, Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi, QUANTUM TEACHING, Edisi I, Thn 2005, hal: 1-2

⁴¹ *ibid*, 3-6

- f. Buku pelajaran yang digunakan pada dasarnya sama dengan buku yang dipakai oleh sekolah formal pada umumnya;
- g. Apabila buku yang khusus diterbitkan untuk program Wajar Dikdas belum ada, maka dapat menggunakan buku-buku dari sekolah formal.

3. *Ketenagaan*

Ketenagaan berasal dari kata tenaga yang berarti daya yang dapat menggerakkan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagaan adalah yang biasa kita sebut dengan tenaga kependidikan yang memiliki arti orang yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, serta administrasi pendidikan dimana orang tersebut diambil dari anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.⁴² Sedangkan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah adalah:

1. Seorang penanggung jawab program Wajar Dikdas, diperlukan seseorang yang berwawasan luas dan berkemauan keras;
2. Beberapa guru mata pelajaran umum yang mengajar Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam,

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal: 1171

diprioritaskan bagi yang berpendidikan sarjana D3 atau S1, atau seorang yang cukup berpengalaman dibidangnya;

3. Seorang atau beberapa orang guru pembimbing perpustakaan, diutamakan dari ustadz di pondok pesantren salafiyah tersebut yang memiliki pengetahuan mengenai budaya pendidikan pesantren.⁴³

Memang dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan pada suatu lembaga sangat tergantung kepada peran kepala sekolah. Namun semua itu tidaklah lepas dari peranan seorang guru/pendidik, Drs. Suparlan, M. Ed dalam bukunya yang berjudul “menjadi guru efektif” menjelaskan ada 10 peranan seorang guru, yakni sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, dinamisator, evaluator, fasilitator yang disingkat dengan EMASLIMDEF, dan dipaparkan secara detail sebagai berikut:

1. Educator: Mengembangkan kepribadian, membimbing membina budi pekerti, memberikan pengarahan.
2. Manajer: Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku
3. Administrator: Membuat daftar presensi, Membuat daftar penilaian, Melaksanakan teknik administrasi sekolah.

⁴³ Departemen Agama RI, PERANGKAT ADMINISTRASI Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula dan Wustha, Jakarta 2005, hal: 4-5

semua alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.

Sesuai dengan pengertian diatas, maka untuk program Wajardikdas di Pondok Pesantren Salafiyah juga sangat diperlukan. Dalam hal sarana prasarana, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah berbeda dengan sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah formal pada umumnya, seperti: gedung, kelas-kelas, kantor tenaga kependidikan, meja, bangku, papan tulis, dan lain-lain. Sedangkan untuk program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah tidak banyak memerlukan sarana prasarana, karena proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun asal memungkinkan untuk kegiatan pembelajaran, seperti masjid, mushola, ruang serba guna, aula, ruangan khusus untuk belajar, dan lain-lain.

Selain itu dibutuhkan juga perpustakaan yang menyediakan buku-buku teks dan berbagai buku penunjang lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran umum, baik yang diajarkan secara langsung (Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA) maupun tidak secara langsung (Bahasa Inggris, IPS, dan PKn).⁴⁶

5. *Metode Pembelajaran*

Metode pembelajaran adalah suatu teknik atau cara dalam penyampaian pengetahuan yang diterapkan oleh guru saat proses kegiatan

⁴⁶ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta 2006, hal: 20-21

8. *Supervisi*

Supervisi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas sekolah dalam memimpin guru-guru serta petugas lainnya yang bertujuan untuk perbaikan dalam pengajaran, menstimulir, menyeleksi perkembangan-perkembangan jabatan, memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, serta metode, dan evaluasi pengajaran.⁴⁹

Seorang kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor tidaklah bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh para petugas supervisi lainnya. Para petugas tersebut terbagi atas dua bagian yakni:

- a. *Ekstra Sekolah*, terdiri dari petugas-petugas supervisi dari kantor-kantor Jawatan Pendidikan yang membawahi sekolah;
- b. *Intra Sekolah*, yang terdiri atas pembantu kepala sekolah, ketua jurusan, para penasehat, librarian, para konseelor, dan lain-lain.⁵⁰

Sedangkan yang dikatakan dengan supervise pada penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah juga tidak jauh berbeda. Seperti yang tertulis pada buku “petunjuk teknis” program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah, supervisi dibagi atas empat bahasan, yaitu: siapa sajayang bertindak sebagai supervisor, tujuan dari

⁴⁹ Hendiyat Soetopo, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Bina Aksara Jakarta, hal: 26
⁵⁰ *ibid*, 39

demonstrasi mengajar, kemanfaatan perpustakaan, petunjuk-petunjuk berupa edaran dan sebagainya.⁵¹

9. *Monitoring*

Secara bahasa monitor berarti: pantau/pencatat/pendengar,⁵² yaitu seorang yang memiliki tugas sebagai pengawas pada dunia pendidikan. Pada dasarnya, seorang pengawas pendidikan merupakan tenaga kependidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik bertujuan untuk membantu dan membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih optimal.⁵³ Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan untuk membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan, diperlukan kemampuan-kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas profesional. Oleh sebab itu, kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan

⁵¹ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta, 2006, hal: 24

⁵² Drs. Djalinus Syahy dkk, Kamus Inggris Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal: 232

⁵³ Subairi, Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar, Hal: 146

- d. Ketersediaan alat peraga pendidikan dan buku teks pokok/penunjang.⁵⁴

10. Pelaporan

Suatu laporan memang sangat dibutuhkan, baik dalam organisasi maupun lembaga pendidikan. Karena di dalam laporan mencakup beberapa aspek yang memang perlu untuk dicantumkan. Seperti halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah juga bertujuan untuk mengetahui data atau kondisi yang sebenarnya. Tentunya dalam penyusunan laporan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan program yang akan dilaporkan.

Penyusunan laporan penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah sangat diperlukan, baik bagi instansi terkait maupun bagi penyelenggara program itu sendiri. Berikut beberapa aturan-aturan dalam pembuatan laporan bagi Pondok Pesantren Salafiyah dalam perannya sebagai penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun:

1. Dalam penyusunan laporan penyelenggaraan program disusun oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama

⁵⁴ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta, 2006, hal: 24

Setelah mushola siap untuk dipergunakan, kemudian awalnya beliau KH. Usman Al-Ishaqi mengajak 15 orang yang berasal dari penduduk sekitar untuk mengaji dan belajar Al-Qur'an. Dengan ketulusan dan keluwesan yang dimiliki oleh KH. Usman Al-Ishaqi, beliau berhasil membawa ke-15 orang tersebut untuk lebih mendalami agama Islam dengan ajara-ajaran yang lain.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1963 mushola tersebut mengalami perkembangan dan telah memiliki 4 kamar, demikian pula halnya dengan santri yang awalnya hanya 15 orang kini bertambah menjadi 70 orang. Puluhan orang tersebut diajari ilmu fiqh dengan menggunakan kitab Sulam Safinah sebagai bekal awal dalam menjalankan ubudiyah. Sampai akhirnya beliau KH. Usman Al-Ishaqi mendirikan Pondok Pesantren Salafiyah yang diberi nama Raudlotul Muta'allimin.⁵⁶

Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin yang tepatnya berada di jalan Jatipurwo VII/15 Semampir Surabaya ini merupakan salah satu dari sedikit Pesantren di negeri ini yang masih mempertahankan tradisi salafiyahnya sampai sekarang, dimana para santri yang ada akan menghabiskan waktunya hanya untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama, seperti: fiqh, hadist, tafsir Al-Qur'an, aqidah ataupun tauhid.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan KH. M selaku pengasuh pondok

⁵⁷ Data yang diperoleh dari *kompas*, Jum'at 27 Januari 2008

Selangkah demi selangkah pendidikan An-Nur sedikit meningkat, dari sistem mengaji biasa dikembangkan dengan pembelajaran kitab-kitab Salaf yang akhirnya terkoordinasi dalam wadah Madrasah Diniyah An-Nur (Tahun 2006).

Selain hal tersebut, perkembangan yang berkaitan dengan skripsi ini ialah mengenai program pembelajaran. Untuk program pembelajaran yang diusung oleh Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya ada tiga, yakni pondok pesantren, madrasah diniyah, dan Wajardikdas. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya ini, yang secara structural penulis mencantumkan pada lembar lampiran.⁵⁸

B. Implementasi Wajardikdas Sembilan Tahun Di Lembaga Pendidikan Dan Pesantren An-Nur Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya Dan Analisisnya

1. Latar Belakang Berdirinya Wajardikdas Sembilan Tahun

Atas tuntutan masyarakat dan para Wali Santri di Pondok Pesantren An-Nur dan Pondok Pesantren Salafiyah Raudlatul Muta'allimin agar Madrasah Diniyah yang ada di pondok dapat memperoleh Ijazah yang formal, sebagaimana perolehan ijazah dari sekolah-sekolah umum dengan harapan agar para santri dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

⁵⁸ Data yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di kantor Pondok Pesantren Salafiyah Raudlotul Muta'allimin Surabaya

2. Keadaan Guru di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya.

Untuk melayani 9 kelas yang ada saat ini Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya memiliki staf pengajar sebanyak 9 orang, 3 diantaranya bergelar S1, sedangkan 6 orang lainnya sedang menyelesaikan S1. Untuk mengetahui kondisi guru lebih lanjut, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut⁵⁹:

Tabel I

Daftar guru

Lembaga pendidikan dan pesantren an-nur surabaya

NO.	NAMA	JABATAN	PEND. TERAKHIR
1	Achmad Shofawi	Kepala Lembaga	MA
2	Fathur Rahman	Kepala Sekolah	MA
3	H. Izzuddin	Wakasek/Guru IPS	SMA
4	Nurmilawati	Guru Matematika	SMA
5	Mukhlis Sianto	Guru Matematika	SMA
6	Syamsul Arifin	Guru Bhs. Indonesia	MA
7	Hanafi Muslim	Guru PKN	MA
8	Luqman Hakim	Guru Biologi	MA
9	Cahyawati, Spd.I	Guru Bhs. Inggris	S1
10	Lisa Oktavia, Spd.I	Guru Fisika	S1
11	Husnul Indrianti, Spd.I	Guru Bhs. Indonesia	S1

Dari tabel di atas, analisisnya dapat disimpulkan bahwa dewan guru yang ada Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya kurang memenuhi persyaratan. Karena pada dasarnya untuk Wajardikdas, guru yang mengajar mata pelajaran umum minimal sudah menempuh S1. factor

⁵⁹ Sumber data: Dokumen Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya

Pesantren An-Nur Surabaya tidak lantas mengikuti kurikulum yang biasa digunakan di Pondok Pesantren Salafiyah, seperti sorogan dan lain-lain. Akan tetapi kurikulum yang digunakan adalah KTSP.⁶² Karena pada dasarnya dalam program Wajardikdas, yang diajarkan memang khusus untuk materi-materi pelajaran umum.

KTSP adalah kepanjangan dari Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan. Dari situ dapat diambil kesimpulan dimana untuk satuan pendidikan diperbolehkan menggunakan kurikulum apapun yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan yang ada di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya menggunakan metode tutorial saat KBM berlangsung. Menurut H. Izzuddin pelaksanaan tutorial dirasa paling tepat bila dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya pada program WAJARDIKDAS yang memang mayoritas muridnya adalah santri dan anak jalanan yang latarbelakangnya sulit untuk bisa menyerap ilmu pengetahuan umum apabila gurunya menggunakan metode pembelajaran CBSA ataupun yang lainnya yang memaksa murid untuk lebih aktif⁶³.

Disamping itu, kurikulum secara keseluruhan yang ada di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana ada tujuh poin yang menjadi pedoman. Ketidaksesuaian tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

⁶² Hasil observasi tanggal 03 Januari 2010

⁶³ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah H. Izzuddin

- a. Kurikulum yang digunakan memang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait, untuk poin ini tidak jadi masalah.
- b. Mata pelajaran yang wajib diajarkan meliputi:
 - 1) Bahasa Indonesia,
 - 2) Matematika, dan
 - 3) IPA.

Materi tersebut merupakan materi yang diperuntukkan bagi tingkat Wustho saja. Sedangkan untuk tingkat Ula, materi yang nantinya akan diujikan melalui Ujian Nasional (UNAS) semuanya diajarkan. Sedangkan yang diajarkan di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya meliputi: Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Hal ini tentunya kurang sesuai bila mengingat peraturan yang sudah ditetapkan bagi program WAJARDIKDAS bahwasannya untuk materi pokok yang harus diajarkan pada program ini meliputi: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Matematika, dan Bahasa Indonesia.⁶⁴

Menurut H. Izzuddin akan lebih bermanfaat bagi masa depan para santri apabila materi yang diajarkan adalah Bahasa Inggris daripada Bahasa Indonesia. Menurut beliau para santri akan mampu atau setidaknya mengerti Bahasa Indonesia tanpa diajari oleh seorang guru di dalam suatu kelas. Karena Bahasa Indonesia bisa dipelajari sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

⁶⁴ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, , Jakarta, 2006, hal: 12.

rutinitas beliau dimana setiap satu bulan sekali beliau selalu menilik di kantor guru untuk mengadakan tanya jawab seputar perkembangan program Wajardikdas guna mengevaluasi masalah-masalah yang ada, baik dari kesulitan guru maupun kenakalan sebagian santri. Menurut salah satu guru, beliau termasuk pemimpin yang inovatif. Buktinya beliau selalu memiliki alternatif-alternatif untuk mencarikan solusi atas masalah yang sedang ada.⁶⁸

Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, untuk kegiatan monitoring memang dikhususkan bagi pihak pimpinan lembaga dan pimpinan pondok pesantren salafiyah saja, mengingat tujuannya mencakup dari dua lembaga tersebut. Sedangkan untuk kegiatan monitoring yang beliau lakukan sudah memenuhi standar, yakni berkisar pada:

- a. Pencapaian target kurikulum;
- b. Pencapaian target kegiatan Pondok Pesantren Salafiyah;
- c. Kehadiran guru, karyawan, dan siswa;
- d. Ketersediaan alat peraga pendidikan dan buku teks pokok/penunjang.⁶⁹

Dari keempat hal tersebut, yang belum tersentuh hanya pada poin empat saja, yakni mengenai pengadaan alat peraga. Hasil analisa penulis mnenyatakan bahwa monitoring yang dilakukan oleh pimpinan Lembaga

⁶⁸ Hasil wawancara dengan guru Pkn, bapak HM

⁶⁹ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta, 2006, hal: 24

Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali satu yaitu pengadaan alat peraga pendidikan. Hal ini disebabkan karena sebuah Lembaga yang menyekenggarakan Wajardikdas umumnya memang tidak membutuhkan adanya alat peraga pendidikan.⁷⁰

j) Pelaporan

Dari empat hal yang menjadi ketentuan dalam pembuatan laporan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kekurangannya hanya terletak pada siapa yang menyusun laporan tersebut. Di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya yang menyusun laporan bukannya Achmad Shofawi Al-Ishaqi selaku pimpinan lembaga melainkan kepala sekolah, yakni bapak Fathur Rahman. Meskipun demikian menurut bapak Fathur Rahman dalam penyusunan laporan program Wajardikdas tersebut sudah melalui pengecekan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga.⁷¹

Kemudian setelah penyusunan laporan selesai beliau bapak Fathur Rahman selaku penanggung jawab program Wajardikdas langsung menyerahkannya kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dengan tembusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Analisa penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan yang ada di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya sudah tepat. Hal

⁷⁰ Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga, AS

⁷¹ Hasil wawancara dengan kepala sekolah, bapak FR

Dengan demikian saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, semua murid hanya dapat duduk di atas lantai. Meskipun pada dasarnya tidak ada peraturan dari manapun, baik dari Depag maupun Diknas yang mempersoalkan hal tersebut, akan tetapi menurut beliau rasa nyaman dan kondusif yang ada di dalam kelas merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam tercapainya tujuan dari proses kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar fasilitas yang dimiliki kurang memadai. Kalau sudah demikian, maka akan sangat sulit bagi para santri untuk dapat menyerap pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru.

Beliau mengatakan demikian sangat masuk akal mengingat beliau selaku guru matematika yang sudah tiga tahun lebih menjadi tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya. Disetiap pertemuannya, beliau selalu merasa nyaman apabila di dalam kelas setiap santri mendapatkan satu tempat duduk serta meja. Karena selama ini, saat para santri mendengarkan penjelasan dari materi yang disampaikan oleh beliau dimana saat menyimaknya para santri dengan posisi duduk di atas lantai, maka menurut beliau hal yang demikian akan sangat merusak konsentrasi dari para santri itu sendiri, baik itu karena bergurau atau bahkan tertidur. Mungkin dikarenakan posisinya yang demikian membuat para santri jenuh untuk menyimak yang sehingga menjadi ngantuk. Belum lagi saat para santri harus menulis materi yang

dituliskan guru di papan tulis. Para santri akan merasa sangat kesulitan dikarenakan harus melihat ke atas terus menerus.⁷⁴

Hal tersebut di atas dirasa semakin kuat kebenarannya saat penulis mendengarkan pernyataan dari Bu Cahyawati SS. Selaku guru yang mengajar materi Bahasa Inggris di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya, beliau berpendapat bahwa para santri pada dasarnya memang merasa lebih kesulitan dalam memahami pelajaran-pelajaran umum, apalagi dengan posisi duduk di lantai saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal tersebut akan berbeda bagi para santri saat belajar ilmu-ilmu pengetahuan agama, meskipun posisi duduknya sama. Karena menurut beliau dalam memahami materi pelajaran umum, khusus bagi para santri membutuhkan konsentrasi penuh dan kenyamanan yang lebih saat belajar di dalam kelas. Beda halnya dengan saat para santri belajar ilmu-ilmu agama. Meskipun para santri belajar dengan posisi duduk di lantai, mereka tidak merasa kesulitan. Karena untuk materi pelajaran agama, yang terpenting adalah keterangannya dan lebih sedikit dalam kegiatan menulis. Sedangkan untuk materi pelajaran umum, dalam proses kegiatan belajar mengajarnya akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk kegiatan menulis.⁷⁵

Pada pembahasan sebelumnya memang sudah disinggung mengenai hal ini, akan tetapi pembahasan tersebut hanyalah faktor-faktor penghambat kelembagaan secara umum. Berikut penulis akan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak MS selaku guru Matematika.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bu C selaku guru Bahasa Inggris.

Bahkan saat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, apabila semua buku yang ada di perpustakaan semuanya dikeluarkanpun masih kurang. Hampir semua santri merasa kesulitan belajar apabila masing-masing dari mereka tidak memiliki satu buku paket, baik dari tingkat Ula maupun Wustho.

Hal ini mendapatkan respon positif dari pendiri Lembaga, yakni Achmad Shofawi Al-Ishaqi. Dalam salah satu rapat yang dilaksanakan di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya beliau memutuskan untuk meminta bantuan dari Depag maupun Diknas. Selain itu beliau juga memutuskan untuk membantu para santri dengan cara photocopy sebagian dari buku yang ada. Akan tetapi hal tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan untuk para dewan guru diminta untuk mencari informasi mengenai jenis/judul buku pedoman, baik bagi guru maupun LKS bagi para santri.⁷⁶

Pasalnya, buku yang dikeluarkan atau diterbitkan dari Depag maupun Diknas isinya kurang lengkap dan sulit untuk dipelajari. Hal ini nampak terlihat jelas saat Unian Nasional berlangsung. Dimana soal-soal yang ada di UNAS khusus Wajardikdas hanya sekitar 60-70% saja yang ada di dalam buku paket terbitan departemen tersebut. Karena pada dasarnya antara pendidikan formal dengan program Wajardikdas memang berbeda. Jadi buku paket yang digunakanpun harus berbeda. Bagi para santri tentu merasa kesulitan jika harus disamakan pembelajarannya

⁷⁶ Hasil rapat pengasuh serta dewan guru di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya, Agustus 2007.

Surabaya mengikuti UNAS. Tepatnya pada tahun 2007-2008 jumlah santri yang lulus Ujian Nasional sangat memprihatinkan. Untuk tingkat Ula saja santri yang dinyatakan lulus tidak lebih dari 40%, sedangkan untuk tingkat Wustho hanya berkisar diangka 15 %.

Hal tersebut tentunya menjadi kecemasan tersendiri, baik bagi santri maupun para wali santri. Mengingat tingkat kebutuhan santri yang cukup tinggi terhadap ijazah yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk meneruskan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan sebagian dari mereka menggantungkan hidupnya dengan ijazah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disaat rapat di tahun berikutnya yaitu Agustus 2008, Achmad Shofawi Al-Ishaqi selaku pendiri lembaga mengeluarkan kebijakan yang mufakat. Hasilnya mulai tahun ajaran baru 2008-2009 untuk program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya, waktu tatap muka untuk proses kegiatan belajar mengajarpun ditambah. Yang awalnya hanya satu kali pertemuan dalam satu minggu, sekarang menjadi dua kali dalam satu minggu, yaitu pada hari sabtu dan selasa. Sedangkan untuk jam masuknya tidak berubah, yakni dimulai pukul 21.00-23.00WIB.⁷⁹

Keputusan tersebut di atas dinilai cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenaikan angka kelulusan santri pada Ujian Nasional tahun 2008-2009. Di tahun tersebut santri yang lulus UNAS untuk tingkat Ula sudah mencapai 80%, sedangkan untuk tingkat Wustho santri yang

⁷⁹ Hasil rapat pengasuh serta dewan guru di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya, Agustus 2008.

???? ?b? Ub ???? ?b??

"Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat".

Selain pendapat dari dewan guru, penulis juga memaparkan pendapat dari salah satu santri di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya. Yaitu Muhammad Nasir yang kini duduk di kelas II tingkat Wustho. Dia mengatakan kesulitannya apabila harus belajar di malam hari daripada pagi hari. Dia sering merasa kelelahan disaat KBM berlangsung sehingga tidak terasa tertidur di dalam kelas. Realita yang ada, sebagian besar dari para santri yang mengikuti program Wajardikdas ialah santri di beberapa pondok Pesantren Salafiyah, sedangkan sebagian lagi adalah mereka-mereka yang sudah bekerja. Dia (Muhammad Nasir) adalah salah satu santri di Lembaga Pendidikan dan Pesantren An-Nur Surabaya yang di luar dia juga berstatus sebagai santri di salah satu Pondok Pesantren Salafiyah Roudlotul Muta'allimin. Tentu saja dia bisa membedakan bagaimana bila belajar di pagi hari dan bagaimana belajar di malam hari. Karena di waktu pagi dia aktif mengikuti kegiatan yang ada di Pondok Pesantrennya. Belum lagi bagi mereka yang harus bekerja mulai pagi sampai sore hari.⁸¹

Hal-hal inilah yang memang sampai sekarang masih belum ditemukan jalan keluarnya. Meskipun pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengikat baik dari Depag maupun Diknas mengenai hal ini, karena

⁸¹ Hasil wawancara dengan M.N salah satu santri yang duduk di kelas II tingkat Wustho.

Hal tersebut terasa sudah wajar apabila dialami oleh santri-santri. Hal ini tentunya disebabkan oleh latarbelakang santri itu berbeda dengan latarbelakang dengan anak-anak lain pada umumnya. Seorang santri biasanya sudah dari dini terdoktrin dan terpengaruhi pola pikirnya. Hal tersebut tentu saja diakibatkan oleh factor-faktor yang dominan, misalnya factor keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dirasa sangat mempengaruhi pemikiran seseorang yang masih dini.

Bahkan penulis sering mendengar dari para santri bahwa tidak ada gunanya menguasai ilmu pengetahuan umum tanpa memahami ilmu-ilmu agama. Di suatu ketika, tanpa sengaja penulis berbincang-bincang dengan salah satu ustadz di salah satu pondok Pesantren Salafiyah. Lantas beliau bercerita mengenai pengalaman pribadinya dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat. Selama beliau hidup bermasyarakat, tidak pernah ada tetangga ataupun kerabat yang menanyakan masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu umum. Yang ada ialah orang-orang di masyarakat menanyakan seputar agama, misalnya mengenai hukum fiqih, serta masalah-masalah lain yang menyangkut aqidah. Dari sini saja dapat dinilai masuk akal apabila santri-santrinya juga memiliki pemikiran yang sama. Intinya, yang dimaksud dengan pengelompokan ilmu pengetahuan adalah para santri di pondok Pesantren Salafiyah berpendapat bahwa ilmu agama itu jauh lebih penting untuk dipelajari daripada harus belajar ilmu umum. Singkat katanya, ilmu pengetahuan umum dinomorduakan oleh kebanyakan santri.

Drs. Hendiyat Soetopo, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Bina Aksara Jakarta.

Drs. Suparlan, M. Ed, *Menjadi Guru Efektif*, cet I, Hikayat Publishing, Yogyakarta 2005.

E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik & Implementasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003).

F.X. Suhardana, S.H, *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996.

Hajir, *Metodologi Penelitian*.

http://www.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=2.

Harian Pikiran Rakyat, Senin 27 April 2009 .

H. Lafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi*, QUANTUM TEACHING, Edisi I, Thn 2005.

Jamaluddin Malik, *Pemberdayaan Pesantren*, Cetakan I, Yogyakarta 2005.

Kuncaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991).

Kuntjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Nusa Indah, 1977).

KOMPAS, Jum'at 27 Januari 2008

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Ramdhan, 1991).

M. Athiyah al-Abrasyi, Prof., Dr., *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, alih bahasa oleh H. Bustami, A. Ghani, dan Djohar Bahry, L.I.S., (Jakarta : Bulan Bintang, 1970).

Nana Sudjana Abraham, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).

Najir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gali Indo, 1980).

Prof. DR. Sondang P. Siagian, MPA, "Manajemen Abad-21".

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* .

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983).

